

# ANALISIS HUBUNGAN ANTARA BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, KEMANDIRIAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)

Dina Apriana dan Rudy Suryanto  
*E-mail: dinaapriana@gmail.com*  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## ABSTRACT

*Effective fiscal decentralization carried out since 10 years ago, one side gives greater authority in managing the area, but on the other side raises new problems. This is because the level of fiscal readiness of different areas. Increased authority possessed by local governments is expected to increase the independence of the region by maximizing the potentials in order to stimulate economic growth. This study aims to test how much capital expenditure and regional own revenue affect regional sufficiency and economic growth. This research obtained the result that capital expenditures did not significantly affect the regional sufficiency, while regional own revenue has a positive and significant impact on regional sufficiency. This research also obtains the results that capital expenditure, regional own revenue, and regional sufficiency did not significantly influence economic growth.*

**Keywords:** *Capital Expenditure, Regional Own Revenue, Regional Sufficiency and Economic Growth.*

## PENDAHULUAN

Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebabkan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini berdampak pada semakin luasnya hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Saragih (2003) menyatakan bahwa inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pen-delegasian.

Peningkatan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian daerah dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Desentralisasi fiskal yang efektif dilaksanakan mulai tahun anggaran 2001 bertujuan untuk

meningkatkan kemandirian daerah sehingga daerah mampu menyediakan pelayanan bagi masyarakat, mengembangkan perekonomian local dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang diterapkan pada masa orde baru telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah.

Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Mardiasmo, 2002). Kebijakan desentralisasi fiskal ini sebaiknya diiringi pula dengan terjadinya peningkatan

pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini (Harianto dan Adi, 2007).

Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Adi (2007) menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, adanya korelasi yang kuat antara share belanja investasi dengan tingkat desentralisasi.

Peneliti akan menguji pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah dengan lag 1 tahun terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang pola hubungan antara PAD, Belanja modal, tingkat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Belanja Modal (BM)**

Dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS., suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, Pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

### **Kemandirian Daerah (KD)**

Secara konsepsional ada 4 pola hubungan yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah yaitu (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim, 2004):

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sudah lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

### **Pertumbuhan Ekonomi (PE)**

Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, dan Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah**

Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Wong

(2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Selain itu, bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005 dalam Harianto dan Adi, 2007). Dari pemaparan diatas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>1</sub>: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.***

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah**

Upaya peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002). Peningkatan kemandirian tidak akan mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi (Heriansyah, 2005 dalam Fitriyanti, 2009). Bapennas (2003) menunjukkan adanya peningkatan PAD di-seluruh propinsi dalam era otonomi daerah. Lewis (2003) menemukan hal yang sama yaitu terjadi peningkatan PAD baik ditingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Susilo dan Adi (2007) membuktikan hal yang sama pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menurut Susilo dan Adi (2007) peningkatan PAD dalam era otonomi berpengaruh pada tingkat kemandirian, karena dengan meningkatnya PAD akan meningkatkan rasio kemandirian. Hamzah (2008) menyatakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pengeluaran dalam menjalankan pemerintahannya. Dari pemaparan diatas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>2</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.***

**Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

Penelitian yang dilakukan Adi (2005) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kuncoro (2004) menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian Adi (2007) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Realitas ini mendukung temuan Wong (2004) yang menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap PAD ketika pemerintah daerah melakukan pembangunan pada sektor industri.

Belum memadainya PAD yang dimiliki oleh daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk berpikir kreatif. Investasi, salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengundang hadirnya investor. Dengan demikian, diharapkan belanja yang dilakukan pemerintah daerah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dari pemaparan diatas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>3</sub>: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.***

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Saragih (2003) Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah.

Sidik (2002) dalam Harianto dan Adi (2007) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.

Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi (Adi, 2007). Peningkatan PAD secara signifikan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta memakmurkan masyarakatnya. Masyarakatlah yang kemudian dapat merangsang peningkatan ekonomi regional dengan melakukan aktifitas investasi maupun belanja. Dari pemaparan diatas dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

***H<sub>4</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.***

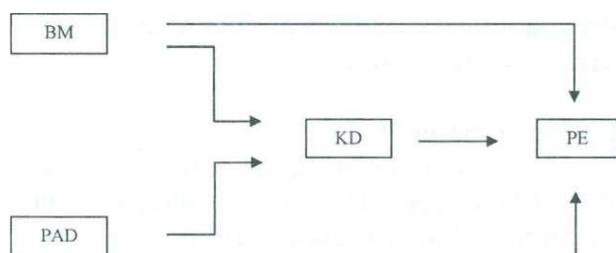
**Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

Lin dan Liu (2000), Mardiasmo (2002) dan Wong (2004) dalam dewanto dan Yustikasari (2007) menyatakan pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai

potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif lainnya. Dari pemaparan diatas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

***H<sub>5</sub>: Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.***



**Gambar 1.**  
**Model Penelitian**

## METODE PENELITIAN

### Sampel dan Data

Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah di pulau Jawa dan Bali. Data yang akan digunakan dalam analisis ini adalah data APBD realisasi pemerintah kabupaten dan kota se Jawa dan Bali tahun 2003- 2007. Untuk kepentingan analisis, data PAD dan belanja modal yang digunakan berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2003-2005, data kemandirian daerah yang diukur dengan rasio kemandirian, menggunakan data realisasi anggaran tahun 2004-2006 sedangkan data pertumbuhan ekonomi, menggunakan data laju PDRB tahun 2005-2007.

### Alat Analisis

#### Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan alat-alat analisis deskriptif seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, standar deviasi. Analisis \ ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal alokasi belanja modal dan PAD. Kemandirian daerah diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan pertumbuhan ekonomi, (dalam konteks daerah) maupun pendapatan per kapita dihitung dengan formulasi berikut ini (Kuncoro 2004 dalam Adi, 2007):

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$\text{PDRB}_t$  = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t.

$\text{PDRB}_{t-1}$  = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t.

#### Uji Asumsi

Dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu:

##### 1. Ukuran Sampel

Ukuran sampel minimal adalah sebanyak 100 - 200 sampel (Ferdinand, 2002, Hair et. Al, 1998 dalam Fauziyah, 2009). Hair dkk menyarankan ukuran sampel minimum sebanyak 5 - 10 kali jumlah parameter yang diestimasi untuk analisis SEM. Jumlah indikator dikali 5-10 (Ferdinand, 2002 dalam Fauziyah, 2009).

##### 2. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji ini perlu dilakukan baik normalitas untuk data tunggal (*univariate*) maupun normalitas *multivariate*. (fauziyah, 2009). Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan nilai C.R. (*critical ratio*) pada *assessment of normality* dengan nilai

kritis  $\pm 2,58$  pada level 1%. Jika nilai C.R. lebih besar dari nilai kritis, maka distribusi data tersebut dinyatakan tidak normal.

### 3. Outliers

Uji *outliers univariate* dilakukan dengan melihat nilai ambang batas dari *z-score* berada pada rentang 3-4 (Hair dkk, 1998 dalam Fauziah, 2009). Oleh karena itu, kasus atau observasi yang mempunyai *z-score*  $e" 3$  dikategorikan *outliers*. Kriteria data adalah jika standar deviasi sama dengan 1 dan rata-rata sama dengan nol. Secara multivariate, outliers dapat dilihat dengan kriteria jarak Mahalanobis pada tingkat  $p > 0,001$ . Jarak Mahalanobis ini dievaluasi dengan menggunakan  $X^2$  pada derajat bebas (df) sebesar jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian.

### Analisis Jalur

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis 1-5. Tujuannya adalah untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung dari beberapa variabel sebagai variabel penyebab, terhadap beberapa variabel lainnya sebagai variabel akibat. Alat ini memungkinkan pengujian pengaruh simultan (efek langsung dan tidak langsung) sebuah variabel terhadap variabel-variabel lain.

Hipotesis 1 hingga 5 menggunakan analisis regresi, yang dalam model ini ditentukan dengan nilai *critical ratio*-nya (CR). Hipotesis akan diterima bila nilai CR lebih dari 2,58 (Hair dkk, 1998 dalam Harianto dan Adi, 2007) pada taraf signifikansi 1%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

**Tabel 1.**  
**Statistik Deskriptif**

	2003	2004	2005	2006	2007
Belanja Modal					
Minimum	11.406.524.000	6.378.733.000	8.440.158.000		
Maximum	182.191.335.000	144.836.754.000	203.296.561.000		
Mean	70.876.230.216,67	53.584.629.516,67	46.351.465.416,67		
Std.	36.343.118.178,871	32.331.311.197,643	37.002.728.447,80		
Deviasi			6		
Pendapatan Asli Daerah					
Minimum	7.962.248.000	7.148.732.000	7.692.953.000		
Maximum	213.126.133.000	209.923.789.000	225.596.438.000		
Mean	40.394.700.933,33	40.745.343.250,00	49.402.767.150,00		
Std.	36.347.335.184,838	36.869.438.808,694	44.260.860.079,71		
Deviasi			7		
Kemandirian Daerah					
Minimum		0,87%	3,15 %	2,80 %	
Maximum		29,60%	29,28 %	27,17 %	
Mean		9,5368 %	10,3000 %	9,2825 %	
Std.		5,42824 %	5,31663 %	5,01900 %	
Deviasi					
Pertumbuhan Ekonomi					

Minimum	-7,82 %	2,02 %	2,64 %
Maximum	7,72 %	7,30 %	8,24 %
Mean	4,5825 %	4,7597 %	5,0993 %
Std. Deviasi	2,01205 %	1,06753 %	1,01227 %

Uji Statistik deskriptif menunjukkan adanya penurunan rata-rata belanja modal pada kabupaten dan kota yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Penurunan rata-rata belanja ini, berbanding terbalik dengan peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya sumber penerimaan lain yang lebih dominan digunakan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, peneliti mengindikasikan pengaruh DAU yang cukup kuat terhadap belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Perhitungan terhadap belanja modal yang dikeluarkan oleh rata-rata kabupaten dan kota di Jawa-Bali menunjukkan terjadi penurunan rata-rata belanja modal sebesar 24,4 % dari tahun 2003 ke tahun 2004. rata-rata belanja pun mengalami penurunan sebesar 13,5 % pada tahun 2005. hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun, pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, sebagian besar digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung.

Tingkat kemandirian daerah tahun 2004 sebesar 9,54%, naik pada tahun 2005 menjadi 10,3 %. Akan tetapi, pada tahun 2006 terjadi penurunan rata-rata kemandirian menjadi 9,28 %. Walaupun ada beberapa daerah yang sudah mapan dengan rasio yang cukup tinggi seperti kota Cilegon, akan tetapi mayoritas daerah masih sangat tergantung dengan dana alokasi umum dari pemerintah pusat maupun propinsi.

Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal

ini disebabkan juga karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seperti tingkat inflasi dan ekonomi makro lainnya selain faktor konsumsi masyarakat maupun investasi. Tahun 2006 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 3,87 %, dari 4,58 % menjadi 4,76 %. Kenaikan ini juga dilanjutkan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 5 % pada tahun 2007.

### **Uji Asumsi**

#### **Ukuran Sampel**

Sampel pada penelitian ini adalah 60 kabupaten kota di Jawa dan Bali selama kurun waktu tiga tahun. Sehingga total sampel pada penelitian ini sebanyak 180.

#### **Normalitas**

Nilai critical ratio berada diantara  $\pm 2,58$ . Hal ini berarti data berdistribusi normal, baik secara *univariate* maupun *multivariate*. Pengujian awal menunjukkan bahwa data PAD, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah tidak berdistribusi normal walaupun sudah dilakukan treatment dengan melakukan kon-versi data penelitian dalam bentuk logaritma. Remediasi dilakukan dengan mengeluarkan data-data yang *outliers*. Dalam penelitian ini, terdapat 5 data yang *outliers*. Setelah data-data tersebut dihapus dan dilakukan pengujian normalitas ulang, hasil pengujian menemukan bahwa data sudah terdistribusi normal.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Normalitas**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
PAD	9,854	11,353	,592	3,200	,706	1,908
BM	9,805	11,308	-,302	-1,631	,033	,088
KD	,017	,221	1,176	6,350	,883	2,384
PE	,021	,082	,146	,791	,503	1,358
Multivariate					2,569	2,453

**Outliers**

Pengujian awal menunjukkan bahwa terdapat beberapa data yang *outliers* walaupun data penelitian telah dikonversi dalam bentuk logaritma. Sesuai dengan fauziyah, 2009 maka peneliti menghapus data yang *outliers* tersebut. Data yang dinyatakan outliers adalah data dengan nilai Mahalanobis d- squared diatas

18,46. Nilai ini didapatkan dari perhitungan menggunakan program Excel dengan menggunakan rumus CHIINV(0,001;4). Angka 4 merupakan derajat bebas (df) dalam penelitian ini, sesuai dengan jumlah variabel yang terdapat didalam penelitian.

**Tabel 3.**  
**Hasil Penelitian**

			Estimate	S.E.	C.R.	Keterangan
KD	<—	BM	-,008	,008	,262	H1 ditolak
KD	<—	PAD	,117	,007	15,750	H 2 diterima
PE	<—	BM	-,002	,003	-,892	H3 ditolak
PE	<—	PAD	,009	,004	2,266	H4 ditolak
PE	<—	KD	,029	,027	1,094	H5 ditolak

**Hipotesis 1**

Hasil pengujian struktural menunjukkan bahwa nilai CR untuk hubungan antara belanja modal dan kemandirian daerah adalah -1,121. Dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah. Dengan demikian, hipotesis 1 ditolak.

Temuan ini mengindikab.

besaran belanja modal ternyata tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini mendukung penemuan Prakoso (2004) yang menyatakan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat.

Alokasi anggaran belanja modal yang tidak tepat sasaran adalah salah satu faktor

penyebab daerah kurang produktif dalam penyaluran dananya. Dana yang dikeluarkan tidak menambah kekayaan tetapi justru menjadi beban DAU. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan tidak bergantung pada pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan sumber- sumber pendapatannya.

**Hipotesis 2**

Nilai CR untuk hubungan antara pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah adalah 15,750. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah dinyatakan diterima.

Dibanding dengan nilai titik potongnya (*cut off value*), nilai CR menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi, artinya semakin besar nilai CR m.d.

semakin besarnya dampak yang ditimbulkan oleh variabel independennya (dalam hal ini adalah PAD). Hasil yang signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang berada di kabupaten dan kota se Jawa dan Bali mampu melepaskan pengaruh tekanan dari pemerintah pusat.

Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti Saragih (2003), Bapennas (2003), dan Lewis (2003) yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan PAD baik ditingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota pada era otonomi.

#### Hipotesis 3

Nilai CR untuk hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi adalah -0,892. Dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ditolak.

Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adi (2007), Wong (2004), dan kuncoro (2004) menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Dilihat dari alokasi belanja modal yang menurun setiap tahunnya, masih banyak daerah yang belum secara optimal menyediakan fasilitas umum yang memadai.

Tetapi walaupun fasilitas tersebut masih minim, pertumbuhan ekonomi mengalami progres yang cukup baik dengan persentase pertumbuhan PDRB yang meningkat tahun 2006. Temuan ini mengindikasikan adanya

faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah selain belanja modal.

#### Hipotesis 4

Hasil pengujian struktural menunjukkan bahwa nilai CR untuk hubungan antara pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah 2,266. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dinyatakan ditolak.

Pengujian ini mendapatkan temuan bahwa adanya indikasi besarnya PDRB yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh variabel selain pendapatan asli daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan Saragih (2003), Brata (2004), dan Tambunan (2006).

Hal ini menegaskan bahwa peningkatan PAD secara signifikan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Peningkatan PAD tidak langsung berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan peningkatan pendapatan asli daerah tidak serta merta meningkatkan daya beli masyarakat maupun kesejahteraannya.

#### Hipotesis 5

Hasil pengujian struktural menunjukkan bahwa nilai CR untuk hubungan antara kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah 1,094. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis 5 kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

Temuan ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya tidak langsung mempengaruhi peningkatan kemandirian

dirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memaksimalkan kekuatan lokal yang dimilikinya. Seharusnya daerah mampu mengimbangi kekuatan dari luar dengan memaksimalkan potensi lokal, salah satunya dengan mempermudah proses investasi.

Pembahasan Analisis jalur (*Path Analysis*) dalam penelitian ini memungkinkan untuk melihat hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung antar variabel. Besarnya efek yang ditimbulkan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4.**  
**Hubungan Antar Variabel**

	Efek Langsung	Efek Tidak Langsung	Total Efek
KD ←— BM	-5,6%	0,0%	-5,6%
KD ←— PAD	78,2%	0,0%	78,2%
PE ←— BM	-6,5%	-0,7%	-7,2%
PE ←— PAD	25,8%	9,5%	35,3%
PE ←— KD	12,2%	0,0%	12,2%

Hasil perhitungan menemukan bahwa belanja modal memberikan efek langsung sebesar -5,6% terhadap kemandirian daerah. Selain belanja modal, variabel yang memberikan kontribusi sebesar 78,2% terhadap kemandirian daerah adalah pendapatan asli daerah. Hal ini berarti setiap kenaikan kemandirian daerah sebesar 1, maka 78,2%nya ditentukan oleh faktor pendapatan asli daerah.

Seperti efek yang ditimbulkannya pada pertumbuhan ekonomi, hubungan langsung maupun tidak langsung belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif. Efek tidak langsung yang dihasilkan dari hubungan ini adalah sebesar -0,7% dengan efek langsung sebesar -6,5% sehingga total efek menjadi -7,2%. Pola hubungan yang negatif ini menandakan belanja modal yang dikeluarkan tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah mencatat hasil yang signifikan yaitu sebesar 78,2%. Selain itu, kemandirian daerah mencatat pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 12,2%. Gambaran ini menunjukkan

bahwa meningkatkan PAD dan kemandirian daerah adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada bab sebelumnya dengan menggunakan Kota dan Kabupaten di Jawa-Bali sebagai sampel, dapat ditarik kesimpulan pendapatan asli daerah mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Akan tetapi, pendapatan asli daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan komposisi dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penerimaan yang menjadi andalan pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah harus memaksimalkan pajak dan retribusi. Hal ini akan berujung pada pembangunan fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan meningkatkan konsumsinya, yang kemudian akan merangsang pertumbuhan

ekonomi. Iklim investasi yang kondusif akan membuat pemerintah daerah mendapatkan sumber penerimaan baru dari pajak yang semakin besar sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana alokasi umum.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah periode penelitian antara tahun 2003-2007, sehingga belum tentu memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan kemandirian daerah maupun pertumbuhan ekonomi. Bagai-manapun, dampak dari kebijakan desentralisasi ini akan lebih nyata bila menggunakan data dengan jangka waktu yang lebih lama.

Maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah pertama periode waktu penelitian hendaknya lebih diperpanjang perbedaan waktunya (*lag*) sehingga dapat diketahui kecenderungan dalam jangka panjang. Dan kedua, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kemandirian daerah dan merangsang per-tumbuhan ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Syukriy. 2008. Beda Belanja Barang dgn Belanja Modal. <http://syukriy.wordpress.com/2008/09/15/beda-belanja-barang-dgn-belanja-modal/>
- Adi, Priyo Hari. 2005. "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali)", Jurnal Studi Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Arsyat, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Fauziyah. 2009. Pengantar SEM. Modul Pelatihan FE UMY. Tidak dipublikasikan.
- Fitriyanti, Ismi rizki. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. Tidak Terpublikasi.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. "Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan Per Kapita", Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan daerah, Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2002. Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Airlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. "Otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah", Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. I No.4 Juni 2002. Jakarta.
- . 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah. Andi offset, Yogyakarta.
- Nanga, Muana. 2005. "Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT : Adakah Posisi Fiskal Lebih Baik", Jurnal Studi Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- . Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2002. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan kemampuan

- Keuangan Daerah", Orasi Ilmiah. Yogyakarta.
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah", Konferensi Penelitian Akuntansidan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- Wong, John D. 2004. "The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity", *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, p. 413-423.